

**PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PENERIMAAN DAERAH**

**STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Yasinta Dolvina Bais

NIM : 982114058

NIRM : 980051121303120057

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2003



S k r i p s i

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN DAERAH STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh :

Yasinta Dolvina Bais

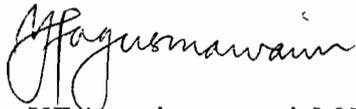
NIM : 982114058

NIRM : 980051121303120057

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

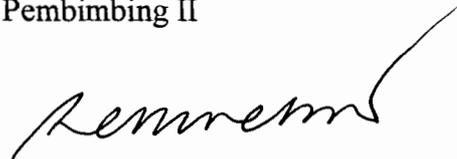
Tanggal : 4 November 2002



Dra. Y.F. Agustinawansari, M.M. Akt

Pembimbing II

Tanggal : 27 November 2002



Fr. Reni Retno Anggraini, S.E., M.Si., Akt

S k r i p s i

**PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PENERIMAAN DAERAH
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Yasinta Dolvina Bais

NIM : 982114058

NIRM : 980051121303120057

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 20 Januari 2003

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap
Ketua	Dra. Y.F. Agustinawansari, M.M. Akt
Sekretaris	Drs. Ir. Hansyadi Yuli H, M.Si., Akt
Anggota	Dra. Y.F. Agustinawansari, M.M. Akt
Anggota	Fr. Reni Retno Anggraini, S.E., M.Si., Akt
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt

Tanda tangan

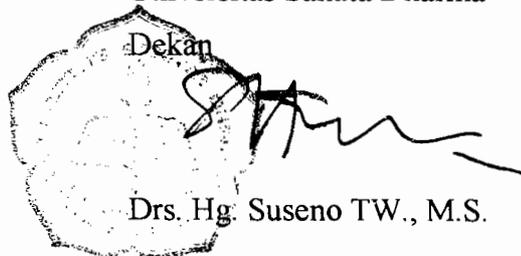


Yogyakarta, 25 Januari 2003

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Drs. Hg. Suseno TW., M.S.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Allah akan menjadikan segala sesuatu indah
pada waktunya”***

Pengkhotbah, 3 : 11a

Skripsi ini saya persembahkan buat :

Yts. Bapak, Mama, Om Agus, Adik

Leydi, Ani, Rini dan Roni

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 25 Januari 2003

Penulis



Yasinta Dolvina Bais

ABSTRAK

PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN DAERAH Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Yasinta Dolvina Bais
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2003

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah pada tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001, (2) menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan PAD, (3) menghitung elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk dan (4) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PAD di kabupaten Belu. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik kabupaten Belu selama bulan Juni sampai Juli 2002.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya kontribusi (peranan) PAD terhadap penerimaan daerah, menghitung elastisitas PAD terhadap PDRB dan jumlah penduduk dan menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan PAD. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) PAD memberikan kontribusi yang sangat kecil dengan rata-rata sebesar 3,17% sehingga belum dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah, (2) Berdasarkan analisis *Least Square* pemungutan PAD di kabupaten Belu cenderung efisien dimana biaya pungut dapat ditekan serendah mungkin sehingga tidak melampaui ratio biaya pungut yang telah ditetapkan sebesar 5% dari realisasi. Sedangkan efektivitas pemungutannya cenderung tidak efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai kurang dari 100% yaitu 78,49%. (3) Berdasarkan analisis *Least Square* elastisitas PAD terhadap PDRB cenderung bersifat elastis yang berarti apabila PDRB berubah 1% dan faktor lain dianggap tetap maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar 6,15%. Sedangkan elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk bersifat elastis yang berarti apabila jumlah penduduk berubah 1% dan faktor lain dianggap tetap maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar 9,36%. (4) Berdasarkan analisis SWOT, pemerintah daerah kabupaten Belu dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan keahlian petugas pemungut PAD dengan sistem komputerisasi, pendataan PAD baik secara fisik maupun visual serta meningkatkan program penyuluhan, pelatihan dan pembinaan pada masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan pemungutan PAD.

ABSTRACT

THE ROLE OF LOCAL ORIGINAL REVENUE TOWARDS REGIONAL REVENUE A Case Study at Local Government of Belu Regency

Yasinta Dolvina Bais
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2003

This research was directed to (1) discover the role of Local Original Revenue (LOR) towards regional revenue in 1997/1998 – 2001 budget year, (2) evaluate effectiveness and efficiency level of LOR collection, (3) examine elasticity of LOR on Gross Domestic Regional Product (GDRP) and number of population. (4) find out the efforts that should be undertaken so as to increase LOR revenue in local government of Belu Regency. This research was conducted at DIPENDA (Revenue Agency) and BPS – Statistics of Belu Regency from June to July 2002.

Interview and documentation were used as the data collection technique, while quantitative analysis was employed to calculate to the amount of LOR contribution (role) on regional revenue. It was also used to examine LOR elasticity on GDRP and number of population and account for effectiveness and efficiency level of LOR collection. Whereas qualitative analysis technique was used to discover the efforts undertaken towards LOR revenue.

Research findings indicated that (1) LOR gave rather small contribution, 3,17% on the average. Consequently, it could be considered as source of regional revenue, (2) Based on Least Square method LOR collection was considered efficient enough in which collection cost could be suppressed as low as possible so as not to go beyond collection-cost ratio in as much as 5% out of the realization. The effectiveness of its collection tended to be not effective in which its realization had tendency to decrease in every budgeted year, (3) Based on Least Square method the elasticity of LOR on GDRP changed to 15 and other factors remain the same that LOR would increase 4,92%. LOR elasticity toward population number tended to be elastic. It meant that when population numbers changed to 1% and other factors remain the same, LOR increased to 2,78%. (4) Based on SWOT analysis, local government of Belu could undertake some efforts to increase LOR revenue through the development of LOR officer skill via trainings, with computerized system, LOR listing, either physically or visually and the improvement of instruction, training program for society so that possible to support the improvement collection of LOR.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas Kasih-Nya yang mulia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Pada kesempatan ini dengan penuh kasih penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini :

1. Drs. Hg.Suseno TW, M.S., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. Dra. YF.Agustinawansari, MM.Akt., sebagai Pembimbing I yang dengan sabar membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Fr. Reni Retno Anggraini, S.E., M.Si., Akt sebagai Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis.
4. Antonius Diksa Kuntara, S.E. yang telah memberikan masukan, saran dan kritik kepada penulis.
5. Drs. Ign. Kuntoro M., Akt sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik.
6. Para Dosen dan Staf karyawan Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan membantu penulis selama kuliah.

7. Drs. I. L. Raydais sebagai kepala kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu bersama staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian.
8. Drs. David Koreh sebagai kepala kantor BPS Kabupaten Belu bersama staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian.
9. Longginus Lenga., S.E. sebagai kepala kantor BPS Kabupaten TTU bersama staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Bapak, Mama, Kakak, Adik dan keluarga besar Raibesi dan Maan yang selalu mendukung saya dengan penuh cinta..... I proud of you
11. Keluarga besar Km-2, Ba'i Edu dan nenek Ida, Bp Moses Sek, Om Niko Sek, Om Frans Sek, Om Lipus Sek, Terima Kasih atas doa dan dukungannya.
12. Teman-teman Akt-A '98 Nita, Lia, Andi, Dedi, Ning, Yeni, Debi, Sinta, Enny,sorry tidak bisa disebut semuanya, Thanks a lot.
13. Teman-teman seperjuangan Sr.Agnes ('makasih atas saran dan kritiknya), Sr.Leony, Sr. Dorotea, Sesil, Lewi, Pak Lexi 'makasih atas dukungannya'
14. Teman-teman KKN Pangukrejo angkatan XXII Mita, Erni, Wulan, Pulung, Cosmas dan Novel..... Thanks.
15. Teman-teman Kepuh 992 : Bapak Anto, Ibu Ratna, Eko, Indah, Ida, m'bak Janik, Helni, Hasna, Herlina, Elita, Resti, Pipit, Ibet, Susi, Dina, Yenti, Lisa, AyuI miss U

16. Sahabatku : Ester (Just Keep our commitment.....”Hargai Perbedaan”), Kun (thanks for your help), Yudit, Landi, Olga, Herlin, Jensry, Dimas, Niny, Mia”Kalianlah yang paling mengerti saya”
17. Saudara-saudaraku tersayang Fitri (makasih atas briffingnya serta kritik dan sarannya) Doni, mas Koko, Lia, Leydi, Yanti, Ois, Vitoen, Fr. Ignas, k’ Obet Manekterima kasih atas dukungan dan doanya.
18. Teman-teman kost **“Poejangga Cinta”** Yudi, Willy, Arki, Egi, Anton, Bouk, Dewa, Hilman, DeniThanks atas dukungannya.
19. Teman-teman IKB Ince, Fa, Marni, Uris, Yane Manek, Lia, Yeni, Marten, Fres, Agnes, Ian, Fredy, Ellen, Jimmy, Minggu..... Thanks.
20. Teman-teman IKTTU Van, Kim, Max, Goris, Joni, Ari, Marko, Us, Son, Eppy, Juna,Thanks.

Akhirnya skripsi ini terselesaikan, disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu penyusun dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima Kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Batasan Istilah	5
G. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Keuangan Daerah	7
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	10
C. Penerimaan Daerah	12
D. Administrasi Penerimaan Daerah	13
E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
1. Pajak Daerah (<i>Local Tax</i>)	16
2. Retribusi Daerah (<i>Local Retribution</i>)	21
3. Bagian Laba BUMD	22
4. Penerimaan dari Dinas-Dinas (<i>Receipts from the Services</i>)	26
5. Penerimaan lain-lain (<i>Other Receipts</i>)	26
F. PDRB dan Pertumbuhan Penduduk	27
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	27
2. Pertumbuhan Penduduk	34
G. Elastisitas	36
H. Efektivitas dan Efisiensi	36
1. Efektivitas	38
2. Efisiensi	38
I. Analisis SWOT	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41

B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	42
1. Analisis Peranan PAD Terhadap Penerimaan Daerah	42
2. Analisis Efektivitas dan Efisiensi	43
a. Efektivitas PAD.....	43
b. Efisiensi Biaya Pemungutan PAD.....	44
3. Elastisitas Penerimaan PAD	45
a. Jumlah Penduduk	45
b. PDRB	46
4. Analisis SWOT	47
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN BELU	48
A. Keadaan Geografi	48
B. Keadaan Penduduk	49
C. Pemerintahan	50
D. Sosoial	51
1. Pendidikan	51
2. Kesehatan	52
3. Agama dan Sosial lainnya	53
E. Sumber Daya Alam	53
F. Tabel Penerimaan Daerah	54
G. Tabel PAD	55
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	56
A. Peranan PAD Terhadap Penerimaan Daerah	56
B. Analisis Efektivitas dan Efisiensi PAD	59
1. Analisis Efektivitas	59
2. Analisis Efisiensi Biaya Pemungutan PAD	63
C. Elastisitas Penerimaan PAD Terhadap Jumlah Penduduk dan PDRB	66
1. Elastisitas PAD Terhadap Jumlah Penduduk	66
2. Elastisitas PAD Terhadap PDRB	69
D. Analisis SWOT	72
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasan Penelitian	79
C. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Daerah Kabupaten Belu Menurut Kecamatan	48
Tabel 4.2	Keadaan Penduduk Kabupaten Belu	50
Tabel 4.3	Penerimaan Daerah Kabupaten Belu T.A 1997/1998 – T.A 2001	54
Tabel 4.4	PAD Kabupaten Belu T.A1997/1998 – T.A 2001	55
Tabel 5.1	Peranan PAD Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Belu T.A 1997/1998 – T.A 2001	57
Tabel 5.2	Efektivitas PAD Kabupaten Belu T.A 1997/1998 – T.A 2001	60
Tabel 5.3	Trend Efektivitas PAD Kabupaten Belu T.A 1997/1998 T.A 2001	62
Tabel 5.4	Efisiensi Biaya Pemungutan PAD Kabupaten Belu T.A 1997/1998 – T.A 2001	64
Tabel 5.5	Trend Efisiensi PAD Kabupaten Belu T.A 1997/1998 – T.A 2001	65
Tabel 5.6	Elastisitas PAD Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Belu T.A 1997/1998 – T.A 2001	66
Tabel 5.7	Trend Elastisitas PAD Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Belu T.A 1997/1998 – T.A 2001	68
Tabel 5.8	Elastisitas PAD Terhadap PDRB Kabupaten Belu T.A 1997/1998 – T.A 2001	69
Tabel 5.9	Trend Elastisitas PAD Terhadap PDRB Kabupaten Belu T.A 1997/1998 – T.A 2001	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang terus berupaya melakukan pembangunan di segala bidang baik pembangunan fisik maupun mental. Terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal untuk meningkatkan kemakmuran seluruh masyarakat secara selaras, adil dan merata merupakan arah yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional.

Untuk mendukung laju pembangunan diperlukan sumber penerimaan pembangunan yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak pasar dunia. Sumber-sumber penerimaan pembangunan diharapkan tetap bertumpu pada sumber dana dari dalam negeri, sedangkan sumber dana dari luar negeri hanya sebagai pelengkap. Dalam pembangunan dewasa ini, pembangunan daerah merupakan arah yang dituju.

Pembangunan nasional dijabarkan dalam pembangunan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu.

Untuk terciptanya kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat

memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahnya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah guna melayani masyarakat, sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

Adanya otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki. Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan diperlukan kerjasama dari seluruh aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah tersebut. Dalam upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai proporsi yang besar disamping bagi hasil pajak dan non pajak, penerimaan pembangunan dan bantuan dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang semakin meningkat diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dituntut peran aktif instansi atau dinas atau unit kerja yang berkaitan langsung dengan sumber-sumber Pendapatan Asli

daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu modal dasar dari penerimaan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi biaya rumah tangga daerah.

Karena komponen Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan sumbangan yang besar bagi penerimaan daerah, maka penulis tertarik untuk mengajukan skripsi dengan judul **“PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN DAERAH – STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**

B. Batasan Masalah

Masalah yang akan dibahas dibatasi pada penerimaan daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan bagian laba BUMD, penerimaan dari Dinas-Dinas dan penerimaan lain-lain.

C. Rumusan Masalah

1. Berapa besar peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001?
2. Apakah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 sudah efektif dan efisien?

3. Apakah Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun tahun anggaran 2001 elastis terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 sudah efektif dan efisien.
3. Untuk mengetahui elastisitas Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 terhadap jumlah penduduk dan PDRB.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi agar Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dapat mengetahui sejauhmana peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penerimaan Daerah sehingga Pemerintah Daerah lebih memperhatikan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan bahan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh ke dalam praktek yang sesungguhnya.

F. Batasan Istilah

1. Penerimaan Daerah adalah penerimaan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan Pusat dan Daerah Tingkat I, yang realisasinya dapat berbentuk bagi hasil penerimaan pajak atau lainnya yang berbentuk subsidi.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari Dinas-Dinas dan penerimaan lain-lain yang sah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teoritis dari hasil studi pustaka. Uraian dalam bab ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam mengolah data yang diperoleh, dan menganalisa permasalahan untuk mendapatkan pemecahan atas permasalahan yang diajukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum Pemerintah daerah Kabupaten Belu yang terdiri dari bagaimana letak geografis, keadaan penduduk, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis dan pembahasan yang di buat untuk menjawab permasalahan pada Bab III.

BAB VI : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan akhir yang di ambil dari masalah yang telah di analisis dan dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah

Salah satu masalah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah ketidakcukupan dana yang berasal dari daerah itu sendiri sehingga proses otonomi benar-benar bisa berjalan lancar, sebab keuangan daerah khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor dominan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan daerah.

Pengertian Keuangan Daerah menurut Supriatno, (1993: 174) adalah

kemampuan daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekontralisasi dan tugas pembantuan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keuangan daerah menurut Mamesah, (1995: 16) adalah

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Pengalokasian penerimaan dalam keuangan daerah dimaksudkan dapat menggali sumber penerimaan seperti Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak

dan bukan pajak, subsidi dan bantuan pemerintah pusat, serta pinjaman daerah.

Kebijakan keuangan yang terus diupayakan kemantapannya secara garis besar mencakup komponen utama sebagai berikut : Ibnu Syamsi, (1983: 188-189)

1. Kebijakan di dalam penerimaan daerah pada dasarnya ditujukan untuk mendorong kemampuan daerah sebesar – besarnya di dalam membiayai urusan rumah tangga sendiri.
2. Kebijakan di dalam pengeluaran berorientasi pada prinsip desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program serta pengambilan keputusan dalam memilih kegiatan dan proyek daerah serta pelaksanaannya.
3. Kebijakan peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah, termasuk kemampuan personil manajemen organisasi.
4. Kebijakan dalam sistem pemantauan dan pengendalian pembangunan daerah sehingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dapat dioptimalkan.
5. Kebijakan dalam membuka partisipasi swasta dalam bidang pelayanan masyarakat di daerah dan penanaman modal secara komersial.

Lingkup keuangan daerah meliputi (Mamesah, 1995:21-22)

1. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan

2. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah yang juga berfungsi sebagai kas daerah.

Asas-asas keuangan daerah menurut Mamesah (1995: 35-36) yaitu

1. Desentralisasi

Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan menyangkut segi-segi pembiayaannya.

2. Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah.

3. Tugas Pembantuan

Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah Suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mamesah, (1995: 20) adalah

Rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Definisi tersebut mengandung unsur sebagai berikut (Mamesah, 1995: 20-21)

1. Rencana operasional daerah, yang menggambarkan adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di mana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, sedang biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan dan jenis proyek.

4. Untuk keperluan satu tahun anggaran yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya, dan untuk tahun anggaran 2000 yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Fungsi dari APBD adalah (Mamesah, 1995: 18)

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.
2. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah.
4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-batas tertentu.

Begitu pentingnya APBD tersebut sehingga penyusunannya harus dilakukan dan dipertimbangkan dengan baik dan saksama dengan memperhatikan skala prioritas, serta dalam pelaksanaannya harus terarah dan terkendali sesuai sarannya sehingga benar-benar berdaya guna dan berhasil guna.

C. Penerimaan Daerah

Dalam usaha penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan sumber penerimaan rutin guna mendukung kelancaran pembangunan daerah. Penerimaan daerah mempunyai peranan dalam membiayai pengeluaran daerah, baik itu pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan.

Adapun penerimaan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah diperoleh melalui usaha penggalian sumber sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu usaha Pemerintah Daerah untuk memperkecil ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba bersih BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

2. Bagi hasil pajak dan non pajak

Pemerintah Daerah mendapat bagian dari penerimaan pajak pemerintah pusat seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sedangkan dari non pajak adalah uang pemasukan hak atas tanah dan iuran hasil hutan.

3. Bantuan Pemerintah Pusat

Bantuan yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mencukupi pembiayaan daerahnya. Untuk mengetahui berapa besar jumlah

penerimaan daerah dapat dilihat dari APBD daerah yang ada sehingga dapat pula diketahui kemampuan daerah dalam mengatur anggaran pengeluaran daerah.

4. Penerimaan Pembangunan

Penerimaan pembangunan merupakan penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berasal dari pinjaman dan digunakan untuk belanja pembangunan yang terdiri dari pinjaman untuk pemerintah daerah dan pinjaman untuk BUMD.

D. Administrasi Penerimaan Daerah

Ada tiga tolok ukur hasil kebijaksanaan anggaran yang dikenal yaitu (Devas, 1989: 143-146)

1. Upaya Pajak

Hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah bersangkutan. Untuk mengukur kemampuan bayar pajak secara objektif digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tetapi ada beberapa kelemahan dalam mengukur kemampuan membayar pajak dengan alat pengukur PDRB yaitu :

- a. PDRB mungkin murni mencerminkan pendapatan bersih daerah itu (misalnya, sebagian besar pendapatan bersangkutan mungkin jatuh ketangan pengusaha yang tidak tinggal di daerah itu).

- b. Tidak semua kegiatan ekonomi di suatu daerah mudah dibebani pajak (misalnya, produk minyak bumi di Indonesia).
- c. Ukuran ini berpijak pada anggaran pemerintah daerah yang memiliki wewenang mengenakan pajak dan menetapkan tarif pajak.

2. Hasil Guna (*Effectiveness*)

Mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak itu, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing.

Hasil guna mencakup semua tahap administrasi penerimaan pajak yakni :

a. Menentukan wajib pajak

Harus ada prosedur pajak yang menyulitkan bagi wajib pajak untuk menyembunyikan hutang pajaknya misalnya, setiap pelanggan listrik membayar listrik yang mengandung unsur pajak, penonton bioskop membeli karcis masuk yang sudah mencakup pajak.

b. Menetapkan nilai pajak terutang

Nilai pajak terutang harus ditentukan dengan cermat dan ini melibatkan wajib pajak atau petugas pajak atau keduanya dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan dalam menentukan tarif pajak yang benar.

c. Memungut pajak

Memungut pajak terutang pada waktunya dapat lebih mudah bila

pembayaran bersifat otomatis (seperti, orang harus membeli karcis bila masuk ke suatu tempat), Pembayaran dapat dipancing (seperti, untuk mendapat kontrak atau surat izin atau layanan masyarakat lainnya orang harus menunjukkan surat yang melunasi pajak terutang), ancaman hukuman atas kelalaian membayar pajak cukup berat.

d. Pemeriksaan Kelalaian Pajak

Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem catatan yang baik, dalam arti kelalaian pajak dapat segera diketahui dan dapat diketahui untuk pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak daerah yang lain.

e. Prosedur Pembukuan yang Baik

Dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar semua pajak yang dipungut petugas pajak benar-benar dibukukan dan masuk rekening pemerintah.

3. Daya Guna (*Efficiency*)

Mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan. Selain mencakup biaya langsung kantor pajak bersangkutan, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak.

E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Azhari, (1995: 51) adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah adalah

penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari Dinas-Dinas, dan penerimaan lain-lain serta Penerimaan Pembangunan (Pinjaman Daerah).

Pendapatan Asli Daerah sangat diharapkan dapat sebagai penyangga utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang potensial berada di daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah (*Local Tax*)

1.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Azhari, (1995: 41) adalah Pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Pajak daerah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu Pajak Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Pajak Negara yang

pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada Daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek pajak seperti Orang/Badan dan benda bergerak atau tak bergerak.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang pajak daerah adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur administrasi pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

1.3. Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu:

- a. Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan di bagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah.
- b. Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah.

- c. 10% penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 20% penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi bagian dari Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota.
- d. Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam sektor Kehutanan, sektor Pertambangan Umum dan sektor Perikanan dibagi dengan imbangan 20% Pemerintah Pusat dan 80% Pemerintah Daerah.
- e. Penerimaan Negara dari pertambangan Minyak Bumi yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 85% untuk Pemerintah Pusat dan 15% untuk Pemerintah Daerah.
- f. Penerimaan Negara dari Pertambangan Gas Alam yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Pemerintah Daerah.
- g. Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan 40% dibagikan kepada Daerah penghasil dan 60% untuk Pemerintah Pusat.
- h. Dari penerimaan Pajak Kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi Desa di wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

1.4. Pajak yang dipungut Daerah Tingkat II

1. Jenis Pajak dan Tarif Pajak menurut Undang Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis pajak dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

a. Pajak Hotel	10%
b. Pajak Restoran	10%
c. Pajak Reklame	25%
d. Pajak Penerangan jalan	10%
e. Pajak Hiburan	35%
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	20%
g. Pajak Parkir	20%

2. Tolok ukur untuk menilai pajak daerah

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada digunakan ukuran sebagai berikut (Devas, 1989: 61-62)

a. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan hasil pungut.

b. Keadilan (*Equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang serta pajak bersangkutan harus adil secara horizontal artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok berbeda tapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi. Pungutan tersebut harus adil dalam arti tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

c. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.

d. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

e. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)

Harus jelas kepada daerah mana suatu pajak dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.

2. Retribusi Daerah (*Local Retribution*)

Retribusi Daerah menurut Soetrisno, (1993: 139) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah menurut Munawir (1990: 4) adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dapat balik secara langsung dan dapat ditunjuk.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam retribusi daerah, yaitu :

1. Adanya pelayanan langsung yang sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.
2. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
3. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

Penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan diperlukan oleh masyarakat. Dilihat dari objeknya retribusi daerah masih dapat dikembangkan melalui peningkatan jasa pelayanan, sepanjang jasa pelayanan yang diberikan tersebut

benar-benar nyata, tidak dibuat-buat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian retribusi tersebut tidak dapat dipungut terlalu tinggi dan tidak boleh merintang keluar masuknya barang atau pengangkutan barang kedalam atau keluar daerah bersangkutan.

Retribusi daerah merupakan pendapatan yang tidak kecil di dalam mengisi keuangan daerah, sedangkan bagi masyarakat merupakan suatu beban. Karena mempunyai arti penting bagi semua pihak maka berlakunya peraturan tentang retribusi daerah perlu pengesahan dahulu oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam peraturan daerah.

Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut :

a. Retribusi dipungut oleh daerah

Dalam pungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk

b. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah.

3. Bagian Laba BUMD

Perusahaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk perkembangan ekonomi daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.

Badan Usaha Milik Daerah bergerak dalam bidang-bidang dari kegiatan

niaga seperti hotel dan bioskop hingga layanan umum. Perusahaan Air Minum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang terbesar selain perusahaan Pos dan Giro, Perusahaan Listrik Daerah dan Perusahaan Telekomunikasi.

Pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah atas dasar pertimbangan menjalankan ideologi yang dianutnya bahwa sarana produksi milik masyarakat, untuk melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami seperti angkutan umum atau telepon, dalam rangka mengambil alih perusahaan asing untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah dianggap cara yang efisien menyediakan layanan masyarakat dan/atau menebus biaya setara untuk menghasilkan penerimaan untuk pemerintah daerah. (Devas, 1989: 111)

Tiga syarat untuk perusahaan daerah adalah (Devas, 1989: 111-112)

1. Tenaga pelaksana dan pembukuan harus dipisahkan agar layanan dapat diberikan dengan efisien artinya pemisahan ini dapat memberi peluang yang lebih besar kepada tenaga pelaksana untuk bertindak leluasa dalam hal yang menyangkut penentuan harga, produksi, pegawai dan juga dapat menjamin tanggung jawab yang lebih besar dari pihak pelaksana serta tingkat hasil dapat dengan mudah dipantau melalui pembukuan sendiri-sendiri.
2. Barang yang dihasilkan harus laku dijual artinya barang itu harus dapat

diuraikan ke dalam satuan-satuan konsumsi dan sebagian besar manfaat konsumsi haruslah bermanfaat untuk perorangan dan bukan untuk masyarakat.

3. Harus ada kemungkinan menebus biaya dengan cara menetapkan harga barang bersangkutan dalam kaitannya dengan biaya artinya sebuah perusahaan daerah harus dapat menebus seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan bahkan memperoleh surplus.

Beberapa kemungkinan sebab-sebab perusahaan daerah kurang berhasil (Devas, 1989: 113)

1. Jenis layanan bersangkutan mungkin tidak cocok untuk dikelola sebagai perusahaan karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.
2. Kegiatan itu sendiri memang sifatnya tidak dapat dikelola sebagai usaha niaga atau pasar setempat karena terlalu kecil.
3. Susunan perusahaan daerah itu mungkin mengakibatkan satuan-satuan biaya makin tinggi dibandingkan dengan biaya menyediakan layanan itu dari dalam bagian tubuh pemerintah daerah.
4. Tenaga pelaksana yang kurang cakap, mungkin karena tidak berpengalaman di bidang pelayanan tersebut dan mereka tahu pemerintah akan selalu menutup kerugian-kerugian yang diderita perusahaan bersangkutan
5. Kesenjangan antara tujuan-tujuan yang harus dicapai perusahaan (misalnya,

antara mengejar laba atau memberikan layanan semurah-murahnya).

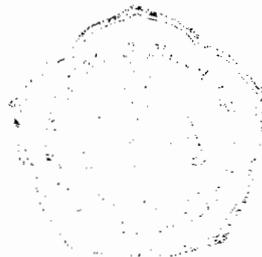
6. Ada masalah campur tangan politik dalam kegiatan sehari-hari perusahaan daerah termasuk seringnya terjadi perubahan pada tujuan yang hendak dicapai.

Laba perusahaan daerah diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh karena itu batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan harus bersifat profesional dan harus berpegang pada prinsip ekonomi secara umum.

Perusahaan daerah merupakan suatu kesatuan produksi yang bersifat (Undang Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah)

- a. Memberi jasa
- b. Menyelenggarakan kemampuan umum
- c. Memupuk pendapatan
- d. Turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan di atas walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, tetapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada laba tetapi pemberian jasa untuk menyelenggarakan pemanfaatan yang bersifat umum. Perusahaan daerah dapat menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya yaitu sifat sosial dan sifat ekonomi.



4. Penerimaan dari Dinas-Dinas (*Receipts from the services*)

Penerimaan dari Dinas-Dinas menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah adalah penerimaan dari Dinas-Dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, misalnya Dinas Pertanian, Dinas peternakan, Dinas kesehatan, Dinas Kehutanan dan lain-lain.

Dinas-dinas daerah bertugas dan berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhatikan untung atau rugi, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi dan pelayanan jasa.

Sekalipun dinas-dinas daerah telah ditetapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, tetapi tidak berarti sumbangan riil yang diberikan sektor ini cukup besar karena dalam kenyataan sektor ini hanya sedikit memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah.

5. Penerimaan lain-lain (*Other Receipts*)

Penerimaan lain-lain terdiri dari hasil penjualan milik daerah, misalnya penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa daerah (Kas Giro) dan lain-lain. Penerimaan daerah dari sektor ini memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan dari Dinas-Dinas.

Bagi daerah pemasukan kas daerah dari sumber penerimaan lain-lain memang tidak begitu besar tetapi diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk membiayai pengeluaran pembangunan yang akan dilaksanakan

F. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Penduduk

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1.1. Pengertian PDRB

Untuk memperoleh gambaran kegiatan ekonomi secara ringkas dan sistematis dengan suatu kerangka informasi yang lengkap dan cocok untuk menganalisis struktur dan sistem perekonomian suatu daerah, dapat dilihat melalui neraca ekonomi regional. Salah satu dari neraca ekonomi tersebut adalah surat pendapatan regional. Pendapatan regional mencakup seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat wilayah dalam waktu tertentu (satu tahun).

PDRB merupakan total nilai produksi atau nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang beroperasi di wilayah atau daerah tertentu. (BPS Kabupaten Belu, 2000: 349)

1.2. Perhitungan PDRB

Dalam menghitung pendapatan regional, hanya dipakai konsep domestik. Berarti seluruh nilai tambah yang di kumpulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu

wilayah (dalam hal ini kabupaten) dimasukkan, tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Dengan kata lain PDRB menunjukkan gambaran *production originated*.

Adanya arus pendapatan (pada umumnya berupa gaji/upah, deviden dan keuntungan) yang mengalir antar wilayah ini (termasuk dari/ke luar negeri) maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk region.

Produk domestik adalah seluruh produk dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut, sedangkan produk region adalah produk domestik ditambah pendapatan dari luar wilayah dikurangi pendapatan yang dibayar ke luar wilayah tersebut atau produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut. (BPS Jakarta, 1993: 3)

Ada dua metode yang dapat dipakai untuk menghitung PDRB yaitu (BPS Jakarta, 1999: 4-5)

1. Metode langsung

Penghitungan langsung menggunakan data daerah secara terpisah dengan data nasional, sehingga hasil penghitungannya memperlihatkan

seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan di daerah tersebut. Pemakaian metode ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang berbeda yaitu :

a. Pendekatan produksi

PDRB merupakan nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dalam suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah bruto merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input.

b. Pendekatan pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi, yaitu upah/gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung netto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari laba, surplus usaha tidak diperhitungkan.

c. Pendekatan pengeluaran

PDRB merupakan jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di dalam suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). Dengan metode ini penghitungan nilai tambah

bruto bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang di produksi.

2. Metode tidak langsung

Cara pengalokasian PDRB propinsi ke tiap kabupaten/kota dengan menggunakan alokator tertentu yang dapat didasarkan atas :

- a. Jumlah produksi fisik
- b. Jumlah tenaga kerja
- c. Jumlah penduduk

Pemakaian masing-masing pendekatan sangat tergantung pada data yang tersedia. Pada kenyataannya pemakaian kedua metode tersebut akan saling menunjang satu sama lain, karena metode langsung akan mendorong peningkatan mutu maupun kualitas data daerah, sedang metode tidak langsung akan menjadi koreksi dan pembanding bagi data daerah.

1.3. Data yang diperlukan untuk menghitung PDRB

Data yang diperlukan untuk menghitung PDRB terdiri dari (BPS Jakarta, 1999: 5-6)

a. Data pokok

Data yang dikumpulkan dari berbagai instansi dan dinas, baik pemerintah maupun swasta yang mencakup data tentang jumlah usaha atau perusahaan dan jumlah tenaga kerjanya.

b. Data Lengkap

Data yang dikumpulkan melalui Survey Khusus Pendapatan Regional (SKPR) untuk mendapatkan data tentang output dan rasio biaya dari berbagai lapangan usaha.

1.4. Hasil perhitungan PDRB

Hasil perhitungan PDRB disajikan atas dua dasar yaitu (BPS Jakarta, 1999: 7)

1. Penghitungan atas dasar harga berlaku

Total produksi atau nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi pada suatu tahun yang dinilai dengan harga satuan setiap komoditi pada tahun tersebut. Perhitungan atas dasar harga berlaku menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, sektor dan subsektor. Penilaian output dilakukan sebagai berikut :

- a. Untuk sektor-sektor primer yang produksinya bisa diperoleh secara langsung dari alam seperti pertanian, kehutanan dan pertambangan.
- b. Untuk sektor-sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri, listrik, gas dan air minum dan sektor pembangunan.
- c. Untuk sektor-sektor yang secara umum produksinya berupa jasa seperti sektor perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah

pemerintah.

2. Penghitungan atas dasar harga konstan

Total produksi atau nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi pada suatu tahun yang dinilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Perhitungan atas dasar harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral. Empat cara penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan yaitu :

a. Revaluasi

Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar.

b. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi.

c. Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga yang berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga.

d. Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda ini nilai tambah diperoleh dari selisih antara biaya output dan biaya antara hasil deflasi tersebut.

Hasil penghitungan PDRB yang dibagi dalam sektor ekonomi yaitu (BPS Jakarta, 1999: 11)

- a. Sektor pertanian yang meliputi subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan.
- b. Sektor pertambangan dan penggalian meliputi kegiatan pertambangan, penggalian, pengeboran, penyaringan dan pengambilan benda non biologis seperti barang tambang dan barang mineral.
- c. Sektor industri pengolahan meliputi industri makanan, industri tekstil, industri kayu, industri kimia dan industri pengolahan lainnya.
- d. Sektor listrik, gas dan air minum.
- e. Sektor bangunan meliputi kegiatan pembuatan dan perbaikan bangunan (konstruksi), baik yang dilakukan oleh kontraktor umum maupun oleh kontraktor khusus.
- f. Sektor perdagangan, restoran dan hotel.
- g. Sektor pengangkutan dan komunikasi meliputi angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, pos dan giro, telekomunikasi.
- h. Bank dan lembaga keuangan lainnya meliputi pelayanan jasa bank, asuransi dan koperasi.
- i. Sektor sewa rumah meliputi kegiatan sewa-menyewa atas penggunaan

sebagian atau seluruh rumah tanpa memperhatikan status pemilikannya.

- j. Sektor pemerintahan meliputi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
- k. Sektor jasa meliputi jasa perusahaan, jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan dan jasa perorangan dan rumah tangga.

2. Pertumbuhan penduduk

Pengaruh pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi. Menurut Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* yang dikutip oleh M. L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (1990: 511) perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi, sebab penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Akibat dari spesialisasi yang terjadi maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja antara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan karena spesialisasi akan mempertinggi tingkat perkembangan teknologi. Mengenai corak pertumbuhan ekonomi Smith berpendapat bahwa bila pembangunan sudah terjadi maka proses tersebut akan terus menerus berlangsung secara kumulatif.

Pandangan Smith tersebut bertentangan dengan pendapat Richardo dan Maltus yang berpendapat bahwa dalam jangka panjang akan mencapai

stationary strata, yaitu suatu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Menurut Richardo dan Maltus perkembangan penduduk yang cepat akan memperbesar jumlah penduduk dengan menjadi dua kali lipat dalam waktu satu generasi, akan menurunkan kembali pembangunan ke taraf yang rendah. Pada tingkat ini pekerja akan menerima upah yang minimal.

Di negara maju pendapat Smith kemungkinan berlaku, karena pertumbuhan penduduk di negara maju justru mempercepat proses industrialisasi. Pertumbuhan penduduk membantu ekonomi negara tersebut karena mereka mempunyai modal yang cukup sedangkan tenaga buruh kurang. Dengan kata lain di negara maju laju pertumbuhan penduduk lambat atau sedikit sehingga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk dan mendorong pembangunan di negara tersebut.

Di negara sedang berkembang, pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk tinggi sehingga kesempatan untuk mengembangkan sumber daya manusia kecil, yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk rendah dan menekan standar kehidupan serta menurunkan tingkat pembentukan modal.

G. Elastisitas

Elastisitas menggambarkan derajat kepekaan atau tingkat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Elastisitas juga dengan mudah dapat diukur dengan membandingkan perubahan dalam indeks harga, penduduk atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Hasil penghitungan elastisitas dapat berupa (Gilarso, 1993: 44)

1. $E > 1$: Elastis, artinya setiap perubahan jumlah penduduk dan PDRB sebesar 1%, maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan lebih dari 1%.
2. $E = 1$: Unitary, artinya setiap perubahan jumlah penduduk dan PDRB sebesar 1%, maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 1%.
3. $E < 1$: Inelastis, artinya setiap perubahan jumlah penduduk dan PDRB sebesar 1%, maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan kurang dari 1%.

H. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan Efisiensi merupakan dua macam kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi kerja dari suatu pusat tanggung jawab tertentu. Efisien dan Efektivitas biasanya bersifat relatif atau komparatif dan bukan bersifat absolut dalam arti bahwa efisien biasanya dibandingkan dengan suatu ukuran tertentu. Misalnya antara pusat pertanggungjawaban yang satu dibandingkan dengan pusat pertanggungjawaban yang lain, atau prestasi sesungguhnya suatu pusat

pertanggungjawaban dibandingkan dengan standar atau anggaran, atau prestasi suatu pusat pertanggungjawaban masa kini dibandingkan dengan masa sebelumnya.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang harus dicapainya (Anthony-Dearden-Bedford, 1993: 203). Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut.

Unit-unit kerja dalam suatu organisasi selain efisien harus efektif karena keduanya merupakan hal yang harus dipenuhi dan tidak dapat di pilih-pilih. Pusat pertanggungjawaban yang ~~yang~~ efektif adalah unit kerja yang mampu mempergunakan sedikit mungkin bahan masukan atau sumber daya untuk mencapai suatu tingkat keluaran atau hasil tertentu. Akan tetapi seandainya tingkat keluaran dari unit kerja tidak mencukupi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai kontribusi dari unit kerjanya, maka dikatakan bahwa unit kerja tersebut tidak atau kurang efektif.

2. Efisiensi

Menurut Anthoni-Dearden-Bedford (1993: 202) efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan, atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang digunakan.

Suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan efisien jika pusat

pertanggungjawaban tersebut :

- a. Menggunakan sumber atau biaya atau masukan lebih kecil untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama.
- b. Menggunakan sumber atau biaya atau masukan sama untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar.

Pada kebanyakan pusat pertanggungjawaban, pengukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan biaya yang digunakan dengan standar pembiayaan yang telah ditetapkan. Standar pembiayaan yaitu gambaran tingkat biaya tertentu yang dapat mengekspresikan berapa besar biaya yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah keluaran tertentu.

I. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah : (Mardiasmo, 2002: 51)

Strategi organisasi yang ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi yakni dengan cara menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) organisasi dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman (*threats*) dan peluang (*opportunities*).

Pengertian SWOT adalah : (Supriono, 1998: 72) analisis faktor intern dan ekstern yang meliputi faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan, faktor kesempatan dan ancaman perusahaan

Masing-masing faktor ini adalah :

1. S = *Strengths* = kekuatan-kekuatan

Adalah faktor-faktor perusahaan yang menguntungkan untuk mencapai sasaran. Yang termasuk dalam unsur-unsur ini adalah :

- a) Dikenalnya produk oleh konsumen
- b) Mutu produk yang terjamin
- c) Bakat dan kemampuan karyawan yang memadai
- d) Koordinasi dan kerjasama yang baik antara karyawan dan pimpinan yang baik
- e) Semangat kerja karyawan yang tinggi
- f) Tersedianya sumber daya yang mencukupi

2. W = *Weaknesses* = Kelemahan –kelemahan

Adalah faktor yang membatasi atau menghambat organisasi dalam mencapai sasaran. Yang termasuk dalam pengertian ini adalah :

- a) Kurangnya dana sebagai sumber daya bagi perusahaan
- b) Kurangnya keahlian dan bakat yang dimiliki karyawan
- c) Mutu produk yang tidak melebihi standar
- d) Sistem penarikan tenaga kerja yang tidak efisien
- e) Manajemen yang tidak kreatif

3. O = *Opportunities* = Kesempatan-kesempatan

Adalah keadaan ekstern perusahaan yang memberi kesempatan berkembangnya atas berhasilnya perusahaan dalam mencapai sasaran. Yang

termasuk pengertian ini adalah :

- a) Belum banyaknya pesaing
- b) Sudah dikenalnya produk oleh pesaing
- c) Kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan kecil yang mudah menghadapi pesaing yang lebih besar
- d) Adanya situasi politik yang stabil
- e) Adanya dukungan pemerintah
- f) Banyaknya instansi / badan yang memberi atau meminjamkan modal

4. $T = threats =$ ancaman-ancaman

Adalah faktor eksternal yang mengancam atau menghambat perusahaan dalam mencapai sasaran. Yang termasuk dalam pengertian ini adalah :

- a) Selera konsumen yang cepat berubah
- b) Sulitnya memperoleh bahan baku
- c) Terlalu banyak pesaing dalam industri
- d) Adanya produk impor yang harganya lebih murah namun kualitasnya lebih baik
- e) Situasi politik yang kacau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus yaitu penelitian terhadap suatu objek tertentu, di mana dari data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2002

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Sub Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak dan Kantor Statistik Daerah Kabupaten Belu.

2. Objek Penelitian

Objek yang diteliti adalah data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu yang berasal dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan yaitu pegawai bagian keuangan.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penerimaan Daerah di kabupaten Belu, dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Contoh Tabel untuk Analisis
Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah

Tahun anggaran (a)	Realisasi PAD (b)	Penerimaan Daerah (c)	Kontribusi (%) (b/c)
Rata-Rata			

2. Untuk mengetahui apakah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien digunakan rumus :

a. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Efektivitas (hasil guna) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan PAD dan potensi hasil PAD. Untuk menentukan efektif tidaknya pungutan PAD digunakan asumsi sebagai berikut (Anthony, Dearden dan Bedrofd, 1993: 10)

- 1). Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD) maka dapat dikatakan pemungutan PAD semakin efektif.

- 2). Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD) maka dapat dikatakan pemungutan PAD kurang efektif.

Apabila tingkat efektivitasnya mengalami perubahan yang tidak menentu pada tiap-tiap tahun anggaran (naik turun), maka untuk menentukan efektivitas tidaknya pemungutan PAD digunakan analisis *Least Square* dengan rumus : (Budiyowono, 1995: 211-212)

$$Y' = a + bx$$

Keterangan :

Y' = Trend Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta yang akan menunjukkan besarnya nilai y apabila $x=0$

b = Variabilitas permintaan x yaitu besarnya perubahan nilai y dari setiap perubahan suatu unit x

x = Tahun

Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan efektivitas selama 5 tahun anggaran yang diteliti.

- b. Efisiensi Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Efisien (daya guna) digunakan untuk mengukur bagian dari hasil PAD yang

digunakan untuk menutup biaya pemungutan PAD. Untuk menentukan efisien tidaknya pemungutan PAD digunakan tolok ukur efisiensi dengan membandingkan angka ratio yang diperoleh dengan standar ratio pemungutan PAD Daerah Kabupaten sebesar 5% dari realisasi. Cara pengukurannya :

- 1). Apabila ratio yang diperoleh masih dibawah standar ratio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa biaya pemungutan PAD efisien.
 - 2). Apabila ratio yang diperoleh melampaui standar ratio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PAD kurang efisien.
3. Untuk hipotesis penerimaan PAD yang bersifat elastis terhadap jumlah penduduk dan PDRB, pengujian dilakukan dengan mencari besarnya elastisitas sebagai berikut : (Davey, 1989: 42)

a. Jumlah Penduduk :

$$\text{Elastisitas} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan PAD}}{\% \text{ Pertumbuhan Jumlah Penduduk}}$$

Untuk mencari Perubahan dalam persentase (%) digunakan rumus :

$$\% \text{ Pertumbuhan Jumlah Penduduk} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

Y_t = Jumlah Penduduk tahun t

Y_{t-1} = Jumlah Penduduk tahun t-1

b. PDRB :

$$\text{Elastisitas} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan PAD}}{\% \text{ Pertumbuhan PDRB}}$$

Untuk mencari Perubahan dalam persentase (%) digunakan rumus :

$$\% \text{ Pertumbuhan PDRB} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

Y_t = PDRB tahun t

Y_{t-1} = PDRB tahun t-1

Dalam penghitungan menggunakan rumus elastisitas di atas akan ditemukan kemungkinan hasil perhitungan yaitu : (T. Gilarso, 1993: 44)

- 1). $E > 1$: Elastis, artinya setiap perubahan jumlah penduduk dan

PDRB sebesar 1%, maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan lebih dari 1%.

2). $E = 1$: Unitary, artinya setiap perubahan jumlah penduduk dan PDRB sebesar 1%, maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan sebesar 1%.

3). $E < 1$: Inelastis, artinya setiap perubahan jumlah penduduk dan PDRB sebesar 1%, maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan kurang dari 1%

4. Analisis SWOT

Merupakan strategi organisasi (pemerintah daerah) yang ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi yakni dengan cara menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman dan peluang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN BELU

A. Keadaan Geografi

Kabupaten Belu, salah satu dari 13 kabupaten/kota madya di Propinsi Nusa Tenggara Timur, terletak pada koordinat 124° - 126° Lintang Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan selat Ombai, sebelah selatan berbatasan dengan laut Timor, sebelah timur berbatasan dengan negara Timor Lorosae dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tabel 4.1
Luas Daerah Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Km ²
01. Malaka Barat	273.56
02. Rinhat	151.72
03. Malaka Tengah	168.69
04. Sasitamean	172.30
05. Malaka Timur	356.72
06. Kobalima	217.06
07. Tasifeto Barat	284.43
08. Kakulukmesak	187.54
09. Tasifeto Timur	275.85
10. Raihat	87.21
11. Lamaknen	214.31
12. Kota Atambua	56.18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

Wilayah Kabupaten Belu seluas 2445,57 Km² yang seluruhnya berupa daratan. Kabupaten Belu dibagi dalam 12 kecamatan. Kecamatan Tasifeto Barat

merupakan kecamatan terluas, sedangkan kecamatan Kota Atambua sebagai ibukota kabupaten mempunyai luas yang paling kecil.

Daerah Kabupaten Belu beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim penghujan. Letak geografis yang lebih dekat dengan Australia dibanding Asia, membuat Kabupaten Belu memiliki curah hujan yang rendah.

B. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional jika penduduk tersebut mempunyai kualitas yang baik. Pertumbuhan yang pesat akan berakibat pada sulitnya peningkatan kesejahteraan yang layak dan merata sehingga akan berakibat pada mutu kehidupan itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidaklah mudah untuk dicapai.

Jumlah penduduk Kabupaten Belu pada tahun 2001 berjumlah 362.191 jiwa dengan luas wilayah 2445.57 Km². Dengan demikian tingkat kepadatan penduduk tahun 2001 rata-rata 148.10 jiwa/Km². Dari jumlah 362.191 jiwa ini 184.049 jiwa adalah laki-laki sedangkan perempuan berjumlah 178.142 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu dari tahun ke tahun sedikit banyak mengalami peningkatan. Jumlah penduduk dari tahun 1997 sampai tahun 2001 seperti terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Kabupaten Belu

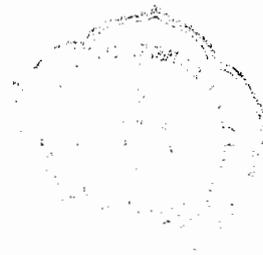
Tahun	Jumlah (jiwa)
1997	243.236
1998	246.251
1999	252.750
2000	362.191
2001	385.973

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

C. Pemerintahan

Kabupaten Belu yang dikepalai oleh seorang Bupati, wilayahnya dibagi menjadi 12 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Malaka barat
2. Kecamatan Malaka Tengah
3. Kecamatan Malaka Timur
4. Kecamatan Kobalima
5. Kecamatan Lamaknen
6. Kecamatan Tasifeto Timur
7. Kecamatan Tasifeto Barat
8. Kecamatan Kota Atambua
9. Kecamatan Rinhat
10. Kecamatan Sasitamean
11. Kecamatan Kakulukmesak
12. Kecamatan Raihat



Tiap kecamatan dikepalai oleh seorang Camat. Menurut data di Pemerintah Daerah terdapat 167 desa/kelurahan di Kabupaten Belu, yang terdiri dari 75 desa swakarya (44,91%), 64 desa swadaya (38,32%), 16 desa swasembada (9,58%) dan sisanya 12 desa masih belum dapat diklasifikasikan. Sebagian besar desa di Kabupaten Belu merupakan desa difinitif (92,81%), sedangkan sisanya merupakan desa persiapan (7,89%).

D. Sosial

1. Pendidikan

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peran pendidikan membuat bidang pendidikan menjadi perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Secara umum perkembangan pendidikan di Kabupaten Belu mengalami kemajuan. Tahun 2001 banyaknya sekolah, guru dan murid di Kabupaten Belu sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak : terdapat 19 buah sekolah dengan murid 858 orang dan 46 orang guru.
2. Sekolah Dasar (SD) : terdapat 282 buah sekolah dengan jumlah murid 56.471 orang dan 2.692 orang guru.

3. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) Umum : terdapat 33 buah sekolah dengan jumlah murid 11.360 orang dan jumlah guru 350 orang.
4. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Umum : terdapat 11 buah sekolah dengan jumlah murid 5.148 orang dan jumlah guru 142 orang.
5. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Kejuruan : terdapat 4 buah sekolah yang terdiri atas 1 Sekolah Teknik Menengah (STM) dengan jumlah murid 240 orang dan jumlah guru 30 orang, 1 Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) dengan jumlah murid 162 orang dan jumlah guru 18 orang, dan 2 Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) yang terdiri atas 1.051 orang murid dan 63 orang guru.

2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang akhirnya semua warga masyarakat memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Oleh karena itu di Kabupaten Belu pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan dibangunnya puskesmas-puskesmas maupun rumah sakit di setiap kecamatan maupun di desa-desa serta penempatan atau penyediaan tenaga-tenaga medis.

3. Agama dan Sosial Lainnya

Mayoritas penduduk Kabupaten Belu beragama Katolik selain terdapat juga agama-agama lain yaitu Islam, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Kerukunan antar umat beragama diupayakan untuk senantiasa tercipta. Di Kabupaten Belu juga terdapat sejumlah fakir miskin, penyandang cacat, manusia lanjut usia (jompo) dan lain-lain.

E. Sumber Daya Alam

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu bermata pencaharian petani. Tanaman pangan meliputi tanaman bahan makanan terutama padi dan jagung, sayur-sayuran, buah-buahan maupun ubi-ubian dan kacang-kacangan. Tanaman pangan perkebunan merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial yaitu kelapa, kopi dan kemiri.

Pembangunan sub sektor peternakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak beserta hasilnya dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat, disamping meningkatkan pendapatan peternak. Gambaran umum mengenai populasi ternak di Kabupaten Belu yaitu bahwa penduduk di Kabupaten Belu lebih banyak memelihara sapi ataupun kerbau, walaupun terdapat hewan-hewan peliharaan lain seperti babi, anjing, ayam dan jenis unggas yang lain. Populasi ternak ini selain dipelihara oleh penduduk, juga hidup secara liar di hutan.

F. Penerimaan Daerah

Tabel 4.3
Penerimaan Daerah Kabupaten Belu
T.A 1997/1998 – T.A 2001

Jenis Penerimaan Daerah	Tahun Anggaran (000 Rp)				
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	2001
1. Bagian sisa hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu	603.767.193	286.133.000	824.540.000	1.944.608.475	2.850.220.000
2. PAD	1.234.750.311	1.366.376	1.486.091	1.779.639.229	4.713.611
3. Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi	34.250.828.086	30.349.549	47.180.041	48.204.477.930	162.539.256
4. Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
TOTAL	36.089.345.582	32.002.058	49.490.672	74.413.274.630	170.103.087

Sumber : DIPENDA Kabupaten Belu

G. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.4
PAD Kabupaten Belu
T.A 1997/1998 – T.A 2001

Jenis PAD	Tahun Anggaran (000 Rp)				
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	2001
1. Pajak Daerah	116.333.145	430.135.000	546.254.000	592.933.000	750.397.458
2. Retribusi Daerah	703.214.438	703.400.000	823.572.000	853.727.000	2.047.617.000
3. Bagian laba BUMD	18.487.248	34.114.000	10.000.000	9.500.229	196.144.000
4. Penerimaan dari dinas-dinas	323.351.909	-	-	-	-
5. Penerimaan lain-lain	73.363.571	198.727.000	106.266.000	323.479.000	1.719.452.542
TOTAL	1.234.750.311	1.366.376.000	1.486.092.000	1.779.639.229	4.713.611.000

Sumber : DIPENDA Kabupaten Belu

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu sumbangan bagi pemerintah daerah yang selama ini dinilai cukup memberikan kontribusi adalah penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Periode yang diteliti adalah dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001. Selama tahun anggaran tersebut terjadi perubahan periode tahun anggaran yaitu pada tahun anggaran 2000. Penghitungan PAD dan realisasi pada tahun anggaran tersebut oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu dimulai pada tanggal 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000 atau selama 9 bulan. Sedangkan 3 bulan sebelumnya yaitu 1 Januari 2000 sampai 31 Maret 2000 dimasukkan ke dalam tahun anggran 1999/2000. Tahun anggaran 2001 dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2001.

A. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Belu telah berupaya untuk meningkatkan kegiatan pemungutan PAD dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu piranti dalam pembiayaan pembangunan daerah, PAD memberikan kontribusi cukup bagi penerimaan daerah. Dengan melihat besarnya realisasi penerimaan PAD, dapat diketahui besarnya peranan PAD terhadap penerimaan daerah. Untuk mengetahui peranan PAD kita dapat membandingkan antara realisasi PAD terhadap penerimaan daerah yang tercermin dalam APBD. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5.1 menunjukkan kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah.

Tabel 5.1
Peranan PAD Terhadap Penerimaan Daerah
Kabupaten Belu
T.A 1997/1998 – T.A 2001

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Penerimaan Daerah	Kontribusi(%)
1997/1998	Rp 1.234.750.311	Rp 36.089.345.582	3,42
1998/1999	Rp 1.366.376.000	Rp 32.002.058.000	4,27
1999/2000	Rp 1.486.092.000	Rp 49.490.672.000	3,01
2000	Rp 1.779.639.229	Rp 74.413.274.630	2,39
2001	Rp 4.713.611.000	Rp 170.103.087.000	2,77
Rata-rata			3,17

Sumber : DIPENDA Kabupaten Belu

Dari tabel 5.1 dapat diketahui bahwa Peranan PAD terhadap penerimaan daerah kecil. Walaupun kontribusi yang diberikan PAD terhadap Penerimaan Daerah relatif kecil, tetapi pertumbuhan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan khususnya pada tahun anggaran 2001. PAD mengalami kenaikan yang cukup

besar yaitu Rp 2.933.970.772. Berbeda dengan PAD, penerimaan daerah mengalami penurunan pada tahun anggaran 1998/1999 dan baru mengalami kenaikan lagi pada tahun anggaran 1999/2000. Selama tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001, kontribusi PAD berkisar antara 2,39% sampai 2,77%

- a. Pada tahun anggaran 1997/1998 PAD memberikan kontribusi sebesar 3,42% terhadap penerimaan daerah. Meskipun pada tahun anggaran 1998/1999 penerimaan daerah mengalami penurunan tetapi kontribusi yang diberikan mengalami kenaikan sebesar 0,85% yaitu dari 3,42% menjadi 4,27% sejalan dengan peningkatan realisasi PAD.
- b. Pada tahun anggaran 1999/2000 realisasi PAD dan penerimaan daerah mengalami kenaikan namun kontribusi yang diberikan justru mengalami penurunan atau lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kenaikan realisasi PAD diikuti pula dengan kenaikan penerimaan daerah. Dari kontribusi yang diberikan pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar 4,27%, pada tahun anggaran 1999/2000 turun menjadi 3,01% atau berkurang sebesar 1,26%.
- c. Keadaan serupa terjadi pula pada tahun anggaran 2000 dimana kontribusi PAD turun sebesar 0,62% yaitu dari 3,01% menjadi 2,39%. Pada tahun anggaran 2001 terjadi peningkatan realisasi PAD sebesar Rp 2.933.971.771 diikuti pula dengan kenaikan penerimaan daerah yang cukup besar yaitu Rp 95.689.812.370. Kontribusi yang diberikan naik sebesar 0,38% yaitu dari

2,39% pada tahun anggaran 2000/2001 menjadi 2,77% pada tahun anggaran 2001.

- d. Rata-rata kontribusi yang diberikan PAD terhadap penerimaan daerah pada tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2001 adalah sebesar 3,17%. Dengan demikian PAD yang dipungut di Kabupaten Belu mempunyai peranan / kontribusi yang sangat kecil terhadap penerimaan daerah.

B. Analisis Efektivitas dan Efisiensi PAD kabupaten Belu

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan PAD dan potensi hasil PAD. Untuk menentukan efektif tidaknya pungutan PAD digunakan asumsi sebagai berikut :

- a. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD) maka dapat dikatakan pemungutan PAD semakin efektif.
- b. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD) maka dapat dikatakan pemungutan PAD kurang efektif.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100%. Semakin tinggi rasio aktivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. (Mardiasmo, 2002: 129)

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Secara jelas efektivitas PAD ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Belu
T.A 1997/1998 – T.A 2001

Tahun anggaran	Realisasi PAD	Target PAD	Efektivitas (%)
1997/1998	Rp 1.234.750.311	Rp 1.701.681.230	72,56
1998/1999	Rp 1.366.376.000	Rp 2.125.334.000	64,29
1999/2000	Rp 1.486.092.000	Rp 2.534.234.215	58,64
2000	Rp 1.779.639.229	Rp 1.872.859.000	95,02
2001	Rp 4.713.611.000	Rp 4.624.456.426	101,92

Sumber : DIPENDA Kabupaten Belu

Tabel 5.2 menunjukkan :

- a. Tingkat efektivitas PAD di kabupaten Belu dari T.A 1997/1998 – T.A 2001 mengalami penurunan yang berarti bahwa selama tahun anggaran tersebut, pemungutan PAD kurang efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target menurun hingga mencapai 58,64% dan hal ini mengindikasikan adanya tunggakan sebesar 41,36%.

- b. Pada tahun anggaran 2000 tingkat efektivitas pemungutan mengalami peningkatan yaitu dari 58,64% menjadi 95,02%. Walaupun demikian pemungutan PAD belum bisa dikatakan efektif karena kurang dari 100%.
- c. Pada tahun anggaran 2001 tingkat efektivitas pemungutan mengalami peningkatan lagi sebesar 6,9% yaitu dari 95,02% menjadi 101,02% dimana pemungutan PAD efektif karena kontribusi yang diberikan meningkat dan telah mencapai target efektif yaitu 100%.

Untuk mengetahui kecenderungan efektivitas pemungutan PAD selama lima tahun anggaran tersebut dapat diketahui melalui trend efektivitas dengan menggunakan analisis *Least Square* dengan rumus :

$$Y' = a + bx$$

Dimana :

Y' = Trend Efektivitas PAD

a = Konstanta yang akan menunjukkan besarnya nilai y apabila $x=0$

b = Variabilitas per x yaitu besarnya perubahan nilai y dari setiap perubahan suatu unit x

Tabel 5.3 di bawah menunjukkan trend efektivitas PAD

Tabel 5.3
Trend Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Belu
T.A 1997/1998 – T.A 2001

Tahun Anggaran	Tingkat Efektivitas (%)	X	XY	X ²	Y' (%)
1997/1998	72,56	-2	-145,12	4	60,59
1998/1999	64,29	-1	-64,29	1	69,54
1999/2000	58,64	0	0	0	78,49
2000	95,02	1	95,02	1	87,44
2001	101,92	2	203,84	4	96,39
Jumlah	392,43	0	89,45	10	

Sumber : DIPENDA Kabupaten Belu

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{392,43}{5} = 78,49 \text{ dan } b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{89,45}{10} = 8,95$$

Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa pemungutan PAD di Kabupaten Belu cenderung tidak efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai belum mencapai 100% atau kurang dari 100% yaitu sebesar 78,49%. Walaupun tingkat efektivitas meningkat pada tiap-tiap tahun anggaran namun meningkat dengan rata-rata perubahan yang kecil yaitu sebesar 8,95%. Salah satu faktor penyebab kecilnya persentase perubahan tingkat efektivitas ini disebabkan karena adanya tunggakan pemungutan PAD. Selama tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 jumlah tunggakan PAD berkisar antara 1,92% sampai 41,36%.

Berbagai masalah yang menyebabkan pemungutan PAD kurang efektif yaitu :

- a. Kesadaran yang kurang dari masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas lapangan dalam pemungutan PAD.
- c. Sarana dan prasarana yang digunakan kurang memadai.
- d. Kurangnya keahlian petugas dalam memproses pengolahan data PAD dengan sistem komputerisasi sehingga cenderung memudahkan petugas membuat kesalahan dalam pengolahan data PAD tersebut.

2. Analisis Efisiensi Biaya Pemungutan PAD

Efisiensi (daya guna) digunakan untuk mengukur bagian dari hasil PAD yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan PAD. Tingkat efisiensi pemungutan PAD dilakukan dengan cara membandingkan biaya pemungutan PAD dengan realisasi penerimaan PAD daerah Kabupaten Belu. Kriteria efisiensi yang dipakai adalah mengacu pada Peraturan Daerah No.9 tahun 1998 tentang Pajak Pembangunan I yaitu sebesar 5%.

Dari hasil perhitungan ratio tingkat efisiensi tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Apabila ratio yang diperoleh masih di bawah standar ratio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PAD efisien.
- b. Apabila Ratio yang diperoleh melampaui standar ratio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PAD kurang efisien.

Untuk melihat efisiensi Biaya Pemungutan PAD dapat ditunjukkan melalui tabel 5.4 :

Tabel 5.4
Efisiensi Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Belu
T.A 1997/1998 – T.A 2001

Tahun anggaran	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi PAD	Tingkat Efisiensi (%)
1997/1998	Rp 60.521.500	Rp 1.234.750.311	4,90
1998/1999	Rp 59.750.200	Rp 1.366.376.000	4,37
1999/2000	Rp 52.520.000	Rp 1.486.092.000	3,53
2000	Rp 78.170.000	Rp 1.779.639.229	4,39
2001	Rp 95.425.500	Rp 4.713.611.000	2,02

Sumber : DIPENDA Kabupaten Belu

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa :

- a. Pada tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 efisiensi mengalami peningkatan di mana tingkat efisiensi sebesar 4,90%, 4,37%, 3,53%, 4,39% dan 2,02%. Menurunnya nilai efisiensi tersebut berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD juga mengalami penurunan.
- b. Walaupun pada tahun anggaran 2000 nilai efisiensi mengalami peningkatan namun pada tahun anggaran 2001 nilai efisiensi kembali mengalami penurunan sampai dengan 2,02% yang berarti tingkat efisiensinya mengalami peningkatan.

Untuk mengetahui kecenderungan efisiensi biaya pemungutan PAD selama lima tahun anggaran tersebut dapat diketahui melalui trend efisiensi dengan menggunakan analisis *Least Square* dengan rumus :

$$Y' = a + bx$$

Dimana :

Y' = Trend Efisiensi PAD

a = Konstanta yang akan menunjukkan besarnya nilai y apabila $x=0$

b = Variabilitas per x yaitu besarnya perubahan nilai y dari setiap perubahan suatu unit x

Tabel 5.5 menunjukkan trend efisiensi PAD

Tabel 5.5
Trend Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Belu
T.A 1997/1998 – T.A 2001

Tahun Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	X	XY	X ²	Y' (%)
1997/1998	4,90	-2	-9,8	4	4,99
1998/1999	4,37	-1	-4,37	1	4,42
1999/2000	3,53	0	0	0	3,84
2000	4,39	1	4,39	1	3,27
2001	2,02	2	4,04	4	2,89
Jumlah	19,21	0	-5,74	10	

Sumber : DIPENDA Kabupaten Belu

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus :

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} = \frac{19,21}{5} = 3,85 \text{ dan } b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{-5,74}{10} = -0,57$$

Dari tabel 5.5 dapat diketahui bahwa pemungutan PAD di kabupaten Belu cenderung efisien karena biaya pemungutan PAD yang digunakan untuk memungut PAD kurang dari 5% yaitu sebesar 3,85%. Pemungutan PAD pada tiap tahun anggaran semakin efisien ditandai dengan menurunnya persentase nilai efisiensi PAD sebesar 0,57%.

C. Elastisitas penerimaan PAD terhadap Jumlah Penduduk dan PDRB

1. Elastisitas PAD terhadap Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan potensi ekonomi yang penting dalam kegiatan ekonomi. Adanya hubungan antara jumlah penduduk dan PAD, maka pada tabel 5.6 disajikan elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk.

Tabel 5.6
Elastisitas PAD Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Belu
T.A 1997/1998 – T.A 2001

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Pertumbuhan (%)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)	Elastisitas
1997/1998	Rp 1.234.750.311	-	243.236	-	-
1998/1999	Rp 1.366.376.000	10,66	246.251	1,24	8,56
1999/2000	Rp 1.486.092.000	8,76	252.750	2,64	3,32
2000	Rp 1.779.639.229	19,75	362.191	43,30	0,46
2001	Rp 4.713.611.000	164,86	385.973	6,57	25,09

Sumber : BPS Kabupaten Belu

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa :

- a. Pada tahun anggaran 1998/1999 elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk sebesar 8,56 yang berarti elastis yaitu jumlah penduduk berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami peningkatan sebesar 8,56%.
- b. Pada tahun anggaran 1999/2000 elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk sebesar 3,32 yang berarti elastis yaitu jumlah penduduk berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami peningkatan sebesar 3,32%.
- c. Pada tahun anggaran 2000 elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk sebesar 0,46 yang berarti inelastis yaitu jumlah penduduk berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami penurunan sebesar 0,46%. Ini berarti pertumbuhan jumlah penduduk tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan PAD.
- d. Pada tahun anggaran 2001 elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk sebesar 25,09 yang berarti elastis yaitu jumlah penduduk berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami peningkatan sebesar 25,09%.

Untuk mengetahui kecenderungan elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk selama lima tahun anggaran tersebut dapat diketahui melalui trend efisiensi dengan menggunakan analisis *Least Square* dengan rumus :

$$Y' = a + bx$$

Dimana :

Y' = Trend Elastisitas PAD terhadap Jumlah Penduduk

a = Konstanta yang akan menunjukkan besarnya nilai y apabila $x=0$

b = Variabilitas per x yaitu besarnya perubahan nilai y dari setiap perubahan suatu unit x

Tabel 5.7 ini menunjukkan trend efisiensi PAD

Tabel 5.7
Trend Elastisitas PAD terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Belu
T.A 1997/1998 – T.A 2001

Tahun Anggaran	Tingkat Elastisitas (%)	X	XY	X ²	Y' (%)
1997/1998	-	-	-	-	-
1998/1999	8,56	-3	-25,68	9	2,34
1999/2000	3,32	-1	-3,32	1	7,02
2000	0,46	1	0,46	1	11,7
2001	25,08	3	75,27	9	16,38
Jumlah	37,43	0	46,73	20	

Sumber : DIPENDA Kabupaten Belu

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{37,43}{4} = 9,36 \text{ dan } b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{46,73}{20} = 2,34$$

Dari tabel 5.7 dapat diketahui bahwa elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Belu selama tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2001 sebesar 9,36 . Dengan demikian selama kurun waktu

tersebut, elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk bersifat elastis di mana jumlah penduduk berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami peningkatan sebesar 9,36%. Nilai elastisitas pada tiap-tiap tahun anggaran tersebut mengalami peningkatan nilai sebesar 2,34%.

2. Elastisitas PAD terhadap PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan perekonomian suatu wilayah. Dengan mengetahui angka-angka dalam PDRB perkapita akan diketahui besarnya peranan masing-masing sektor perekonomian yang nantinya dapat diketahui apakah suatu wilayah tersebut merupakan wilayah pertanian/agraris, industri dan sebagainya. Untuk mengetahui elastisitas PAD terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut ini :

Tabel 5.8
Elastisitas PAD Terhadap PDRB
Kabupaten Belu
T.A 1997/1998 – T.A 2001

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Pertumbuhan (%)	PDRB (000)	Pertumbuhan (%)	Elastisitas
1997/1998	Rp 1.234.750.311	-	168.578.918	-	-
1998/1999	Rp 1.366.376.000	10,66	159.062.867	-5,64	-1,89
1999/2000	Rp 1.486.092.000	8,76	165.783.543	4,23	2,07
2000	Rp 1.779.639.229	19,75	170.608.925	2,91	6,79
2001	Rp 4.713.611.000	164,86	186.572.450	9,36	17,61

Sumber : BPS Kabupaten Belu

Tabel 5.8 di atas menunjukkan :

- a. Pada tahun anggaran 1998/1999 elastisitas PAD terhadap PDRB sebesar $-1,89$ yang berarti inelastis yaitu PDRB berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami penurunan sebesar 1,89%.
- b. Pada tahun anggaran 1999/2000 elastisitas PAD terhadap PDRB sebesar $2,07$ yang berarti elastis yaitu PDRB berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami peningkatan sebesar 2,07%. Keadaan elastis berlanjut terus pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2000 di mana tingkat elastisitas sebesar $6,79$ yang berarti apabila PDEB berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami kenaikan sebesar 6,79%.
- c. Pada tahun anggaran 2001 elastisitas PAD terhadap PDRB sebesar $17,61$ yang berarti elastis yaitu PDRB berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami peningkatan sebesar 17,61%.

Untuk mengetahui kecenderungan elastisitas PAD terhadap PDRB selama lima tahun anggaran tersebut dapat diketahui melalui trend efisiensi dengan menggunakan analisis *Least Square* dengan rumus :

$$Y' = a + bx$$

Dimana :

Y' = Trend Elastisitas PAD terhadap PDRB

a = Konstanta yang akan menunjukkan besarnya nilai y apabila $x=0$

b = Variabilitas per x yaitu besarnya perubahan nilai y dari setiap perubahan suatu unit x

Tabel 5.9 menunjukkan trend efisiensi PAD

Tabel 5.9
Trend Elastisitas PAD terhadap PDRB
Kabupaten Belu
T.A 1997/1998 – T.A 2001

Tahun Anggaran	Tingkat Elastisitas (%)	X	XY	X ²	Y' ² (%)
1997/1998	-	-	-	-	-
1998/1999	-1,89	-3	5,67	9	-3,33
1999/2000	2,07	-1	-2,07	1	2,99
2000	6,79	1	6,79	1	9,31
2001	17,61	3	52,63	9	15,63
Jumlah	24,58	0	63,22	20	

Sumber : DIPENDA Kabupaten Belu

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{24,58}{4} = 6,15 \text{ dan } b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{63,22}{20} = 3,16$$

Dari tabel 5.9 dapat diketahui bahwa elastisitas PAD terhadap PDRB di kabupaten Belu selama tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2001 sebesar 6,15. Dengan demikian selama kurun waktu tersebut, elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk bersifat elastis di mana jumlah penduduk berubah 1% maka penerimaan PAD akan mengalami peningkatan sebesar 6,15%. Nilai elastisitas pada tiap-tiap tahun anggaran tersebut mengalami peningkatan nilai sebesar 3,16%.

D. Analisis SWOT (*Strengths Weaknesses Opportunities Threats*)

Analisis SWOT digunakan sebagai strategi pemerintah daerah yang ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi yakni dengan cara menganalisa faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) organisasi dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman (*threats*) dan peluang (*opportunities*).

Faktor-faktor tersebut juga terjadi di Kabupaten Belu yakni :

1. Kekuatan-kekuatan (*strengths*) :
 - a. Telah disesuaikan/diperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola Pendapatan Asli Daerah (Dinas Pendapatan Daerah) serta perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur sebagaimana diatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya di Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sistem mapatda. Dengan berlakunya sistem mapatda Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pendapatan daerah tidak lagi berorientasi pada sektor pungutan tapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan,

fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional, sehingga :

- a) Dengan orientasi pada kegiatan pada fungsi-fungsi dalam organisasi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga pola koordinasi dapat lebih terarah.
 - b) Sistem pengawasan akan menjadi lebih baik.
 - c) Memberikan dampak kearah peningkatan PAD, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah, peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi daerah dan peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya serta peningkatan sistem pembukuan sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi daerah yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
- b. Tersedianya sumber Pendapatan Asli Daerah yang mencukupi di Kabupaten Belu seperti cendana, kopra, kopi dan sebagainya.
 - c. Memberikan insentif (rangsangan) secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui penerimaan dari target yang ditetapkan (efektivitas pemungutan PAD akan dapat dilaksanakan).
2. Kelemahan-kelemahan (*weaknesses*)

- a. Belum adanya langkah-langkah pengendalian guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai pemungutan PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Kurangnya keahlian petugas dalam memproses pengolahan data PAD dengan sistem komputerisasi sehingga cenderung memudahkan petugas membuat kesalahan dalam pengolahan data.
 - c. Kesadaran yang kurang dari masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
 - d. PAD (pajak daerah dan retribusi daerah) belum dapat mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam meningkatkan pemungutan PAD.
3. Ancaman-ancaman(*threats*)
- a. Adanya situasi politik yang tidak stabil di daerah yang mempermasalahkan proyek rumpunisasi yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk masyarakat yang tinggal di daerah pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan.
 - b. Sulitnya petugas dalam memungut pajak di daerah terpencil karena sarana jalan yang ada kurang memadai (tidak ada angkutan umum dan jalannya yang berlubang dan berbatu) sehingga pemungutan PAD tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Kesempatan-kesempatan (*opportunities*)
- a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang efektif sehingga penyimpangan yang terjadi dalam proses pemungutan PAD yang dapat

merugikan pemerintah daerah dapat diketahui dan diantisipasi oleh aparat yang mengelolanya. Pengawasan dan pengendalian ini meliputi :

- a) Pengawasan dan pengendalian yuridis yaitu pengawasan dan pengendalian yang menitikberatkan pada pungutan PAD telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah yang ada.
 - b) Pengawasan dan pengendalian teknis yaitu pengawasan dan pengendalian yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat cermat kepada wajib pajak/retribusi, misalnya sistem pembayaran yang tidak menyulitkan wajib pajak/retribusi.
 - c) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan yaitu pengawasan dan pengendalian yang ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.
- b. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD merupakan usaha positif dalam menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatkan mutu sumber daya manusia /aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan aparatnya dalam program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

- c. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi daerah sehingga pemungutan PAD dapat ditingkatkan.

Dengan diketahuinya kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang maka pemerintah daerah Kabupaten Belu dapat mengantisipasi ancaman-ancaman yang berupa kelemahan-kelemahan dalam pemungutan PAD dan meningkatkan peluang-peluang peningkatan PAD dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan yang menjadi andalan pemerintah daerah Kabupaten Belu.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan PAD terhadap penerimaan daerah selama tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 berkisar antara 2,39% - 4,27% dengan rata-rata kontribusi sebesar 3,17%. PAD memberikan kontribusi yang kecil dan cenderung menurun meskipun ada kenaikan penerimaan PAD. Hal ini disebabkan karena kenaikan nilai PAD diikuti pula dengan kenaikan penerimaan daerah. Disamping itu kenaikan nilai penerimaan daerah lebih besar dibandingkan dengan kenaikan nilai PAD. Kecilnya kontribusi PAD terhadap APBD ini menyebabkan PAD di Kabupaten Belu belum dapat diandalkan sebagai penerimaan daerah.
2. Tingkat efektifitas PAD berkisar antara 58,64% - 101,92%. Berdasarkan analisis *Least Square*, tingkat efektifitas PAD di Kabupaten Belu cenderung mengalami penurunan pada tiap-tiap tahun anggaran kecuali pada tahun anggran 2000 dan tahun anggaran 2001 mengalami peningkatan. Dengan demikian pemungutan PAD di Kabupaten Belu cenderung tidak efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai kurang

dari 100% yaitu sebesar 78,49%. Walaupun tingkat efektivitas meningkat pada tiap-tiap tahun anggaran namun meningkat dengan rata-rata perubahan yang kecil yaitu sebesar 8,95%.

3. Tingkat efisiensi PAD berkisar antara 2,02% - 4,90%. Berdasarkan analisis *Least Square* tingkat efisiensi PAD di Kabupaten Belu cenderung efisien yaitu sebesar 3,85% dimana besarnya biaya pungut berhasil ditekan seminimal mungkin terhadap realisasi dan masih dibawah standar ratio biaya pemungutan untuk daerah Kabupaten Belu sebesar 5%.
4. Elastisitas PAD terhadap PDRB berkisar antara -1,89% sampai 17,61%. Berdasarkan analisis *Least Square* elastisitas PAD terhadap PDRB selama lima tahun anggaran sebesar 6,15 artinya bersifat elastis yaitu apabila PDRB berubah 1% dan faktor-faktor lain dianggap tetap, maka penerimaan PAD cenderung mengalami peningkatan sebesar 6,15%. Sedangkan elastisitas PAD terhadap jumlah penduduk sebesar 9,36 artinya bersifat elastis yaitu apabila jumlah penduduk berubah 1% dan faktor-faktor lain dianggap tetap maka penerimaan PAD mengalami peningkatan sebesar 9,36%.
5. Berdasarkan analisis SWOT, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu perlu memperhatikan berbagai kelemahan dan juga peluang yang terdapat di daerah Kabupaten Belu sehingga dapat dilakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam meningkatkan penerimaan PAD dan menaggulangi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan PAD.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan waktu penelitian sehingga penulis tidak dapat meneliti lebih jauh hal-hal tertentu yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD seperti faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini berhubungan dengan besarnya tunggakan pembayaran pajak daerah selama lima tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2001.
2. Tidak adanya ukuran yang pasti mengenai batasan tingkat efektifitas sehingga penulis hanya dapat menarik kesimpulan berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai efektifitas dimana apabila kontribusi yang diberikan (realisasi) terhadap sasaran (target) meningkat maka dapat dikatakan efektif. Sebaliknya jika kontribusi yang diberikan (realisasi) terhadap sasaran (target) semakin menurun maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PAD kurang efektif.
3. Untuk menentukan efisiensi pemungutan PAD, penulis hanya membandingkan dengan ratio biaya pemungutan yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Belu yaitu sebesar 5% dari realisasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ratio khusus yang berlaku untuk menentukan apakah suatu unit pertanggungjawaban dapat dikatakan efisien atau tidak efisien.

4. Dalam menghitung tingkat elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB dan jumlah penduduk digunakan asumsi *ceteris paribus* yaitu faktor-faktor lain misalnya tingkat inflasi dan lain-lain dianggap tetap atau tidak berubah.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu dan Kantor Statistik Kabupaten Belu, maka penulis memberikan saran dan masukan yang sekiranya bermanfaat bagi perkembangan penerimaan PAD. Saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Untuk meningkatkan kontribusi atau peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penerimaan Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Belu diharapkan lebih mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan SDM petugas pemungut Pendapatan Asli Daerah dengan cara memberikan pelatihan dan kursus, menggunakan sistem komputerisasi dalam pengolahan data Pendapatan Asli Daerah sehingga kesalahan dalam pengolahan data dapat dikurangi.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan agar realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat disesuaikan bahkan melebihi target yang ingin dicapai pemerintah daerah.

3. Efisiensi biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah cukup baik namun pemerintah daerah diharapkan untuk lebih meningkatkan efisiensi biaya pemungutan tersebut, dengan cara mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan biaya dalam proses pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
4. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB dan jumlah penduduk cukup baik yaitu dengan perubahan (kenaikan) PDRB dan jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan juga (kenaikan). Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan PDRB.
5. Berdasarkan analisis SWOT pemerintah daerah diharapkan untuk lebih meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki yaitu mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumber daya yang ada misalnya : cendana, kopi, kopra. Disamping itu pemerintah daerah juga harus memperhatikan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dan berusaha memperbaiki dengan cara meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah sehingga tunggakan-tunggakan dalam membayar pajak dan retribusi daerah dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. Samudra, Msi. (1995). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT Garmedia Pustaka Utama
- Anthony-Dearden-Bedford. (1993). *Sistem Pengendalian Manajemen I*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Budiyowono, Nugroho. (1995). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. (2001). *Belu Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. (2000). *Pendapatan Regional Kabupten Belu 1996-1999*
- Badan Pusat Statistik Jakarta-Indonesia. (1999). *PDRB propinsi-Propinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha*.
- Davey, Kennet. (1989). *Pembiayaan Pemerintahan Pusat : Praktek dan Relevansi bagi dunia ketiga*. Terjemahan A. Manulang dkk. Jakarta : Universitas Indonesia
- Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*. Terjemahan Masri. Jakarta : Universitas Indonesia
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jhingan, M.L. (1990). *Ekonomi Pemerintahan dan Perencanaan*. Jakarta : CV Rajawali
- Kabupaten Belu, *Pajak Pembangunan I*, Peraturan Daerah No.9 Tahun 1998
- Kabupaten Belu, *Pajak Bahan galian Golongan C*, Peraturan Daerah No.7 Tahun 1998
- Kabupaten Belu, *Retribusi Pasar*, Peraturan Daerah No.1 Tahun 1999
- Kabupaten Belu, *Retribusi Terminal*, Peraturan Daerah No.11 Tahun 1998

- Mamesah, D.J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Miltan, Toha. (1985). *Manajemen Pembangunan Daerah Tingkat II*. Jakarta : Prisma Nomor 12 LP3ES
- Munawir. (1990). *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta : Liberti
- Republik Indonesia, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
- Republik Indonesia, *Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000
- Republik Indonesia, *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999
- Republik Indonesia, *Sistem dan Prosedur Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain Lain*, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999
- Republik Indonesia, *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah*, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998
- Sutrisno. PH. (1982). *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta : BPFE-UGM
- Supriono, R.A. (1998). *Manajemen Straregi dan Kebijakan Bisnis*. Edisi 2 Yogtakarta : BP-FE
- Syamsi, Ibnu. (1983). *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta : Bina Aksara
- Zandjani, Amachi Chairul Tubagus. (1992). *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Tama

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JALAN. EL TARI NOMOR 1 TELEPON NOMOR . 21152
A T A M B U A

Atambua ,9 Juli 2002

K e p a d a

Nomor : 207/ 07 / III / BKBPM/BL-2002
Lampiran :-
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Yth. Dekan FE Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta

di

Yogyakarta

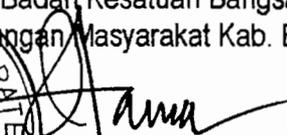
Dengan hormat,
Menunjuk Surat Kepala Dinas Pendapatn Daerah Kab. Belu Nomor :
UP.070/192/VII/2002 tanggal 9 Juli 2002, Perihal Selesai Penelitian, maka
dengan ini disampaikan bahwa :

N a m a : Yasinta Dolvina Bais
A l a m a t : FE . Sanata Dharma Yockyakarta
P e k e r j a a n : Mahasiswi
K e b a n g s a a n : Indonesia

Telah melakukan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
dengan judul : "PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PENERIMAAN DAERAH "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
seperlunya.-

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kab. Belu


Drs. Petrus Hela Mau
NIP. 010222737



Tembusan :

1. Gubernur NTT Cq. Kaban Linmas Prop. NTT, di Kupang;
2. Yang bersangkutan di tempat;
3. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah

1. Bagaimana sejarah pembentukan daerah Kabupaten Belu ?
2. Fasilitas apa saja yang terdapat di daerah Kabupaten Belu ?
3. Geografi
 - a. Dimanakah letak daerah Kabupaten Belu ?
 - b. Bagaimanakah batas wilayahnya ?
 - c. Bagaimana pembagian wilayahnya ?
 - d. Berapakah luas wilayahnya ?
4. Penduduk
 - a. Berapakah jumlah penduduk pada tahun 2001 ?
 - b. Bagaimana komposisi penduduknya ?
 - c. Berapakah kepadatan penduduk ?
 - d. Berapakah angkatan kerja / pencari kerja pada tahun 2001 ?
5. Kekayaan Alam
 - a. Bagaimanakah struktur dan jenis tanah yang ada ?
 - b. Bagiamanakah pemanfaatan tanah yang ada ?
 - c. Apa saja jenis flora dan faunanya ?
 - d. Pertambangan apa saja yang terdapat di wilayah daerah kabupaten Belu ?
6. Perekonomian
 - a. Bagaimanakah sektor pertanian di daerah kabupaten Belu ?

- b. Industri apa saja yang ada ?
 - c. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengembangkan sektor pertambangan di daerah Kabupaten Belu ?
 - d. Bagaimanakah sarana perhubungan yang ada baik transportasi darat, laut maupun udara ?
 - e. Bagaimanakah pengembangan sektor pariwisatanya ?
7. Politik
- a. Bagaimanakah kebijakan dasar politik yang berlaku ?
 - b. Bagaimana pemerintahan yang ada ?

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Ada berapa sektor Pendapatan Asli Daerah yang ada di daerah Kabupaten Belu?
2. Berapakah anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan untuk masing-masing tahun dari T.A 1997/1998 sampai T.A 2001 ?
3. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan PAD tersebut ?
4. Berapakah realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk masing-masing tahun mulai dari T.A 1997/1998 sampai T.A 2001 ?
5. Antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan apakah mengalami peningkatan atau penurunan ?
6. Hal-hal apa saja yang menjadi penyebab kenaikan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah tersebut ?

7. Bagaimanakah prediksi Pendapatan Asli Daerah yang telah di buat pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk masing-masing tahun anggaran dari T.A 1997/1998 sampai T.A 2001 ?
8. Berapa jumlah PDRB yang ada dan seberapa besar sumbangannya terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
9. Berapakah jumlah penduduk yang ada dan seberapa sumbangannya terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
10. Apakah pemungutan Pendapatan Asli Daerah telah berjalan secara efektif dan efisien ?
11. Upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?
12. Berapa besar peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah Kabupaten Belu ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Yasinta Dolvina Bais
Tempat, Tanggal Lahir : Atambua, 12 Januari 1979
Alamat : Jl. Mr. Moh. Yamin Kufeu, Atambua, Belu, NTT
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Kewarganegaraan : Indonesia

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Taman Kanak-Kanak Katolik Kuntum Bahagia Atambua, tahun 1983 - 1985
Sekolah Dasar Inpres Tanah Merah I Atambua, tahun 1985 - 1991
Sekolah Menengah Pertama Katolik Hati Tersuci Maria Halilulik, tahun 1991 -
1994
Sekolah Menengah Umum Negeri I Atambua, tahun 1994 - 1997
Perguruan Tinggi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, tahun 1998 - 2003